

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI I DPR RI**

**(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)**

---

Tahun Sidang : 2013-2014  
Masa Persidangan : III  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan PGS. Dirut PT. Telkom, Dirut PT. Telkomsel, Dirut PT. Indosat, Dirut PT. IM2, Dirut PT. XL Axiata, Dirut PT. Hutchinson CP, dan Dirut PT. Natrindo.  
Hari, Tanggal : Rabu, 29 Januari 2014  
Pukul : 14.00 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : Drs. Ramadhan Pohan, MIS  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : 1. Pandangan Operator Terhadap Regulasi Pemetaan Alokasi Frekuensi di Indonesia;  
2. Penggunaan Frekuensi oleh Operator Telekomunikasi di Indonesia;  
3. Pemenuhan Kewajiban Operator Untuk Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi.  
Hadir : 1. .... orang Anggota Komisi I DPR RI  
2. Para Dirut Operator Seluler  
Beserta jajarannya

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan PGS. Dirut PT. Telkom, Dirut PT. Telkomsel, Dirut PT. Indosat, Dirut PT. IM2, Dirut PT. XL Axiata, Dirut PT. Hutchinson CP, dan Dirut PT. Natrindo pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Ramadhan Pohan, MIS dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. CATATAN :**

1. Komisi I DPR RI mendorong operator telekomunikasi di Indonesia untuk terus berkomitmen menggunakan frekuensi untuk telekomunikasi, guna mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, dengan merujuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komisi I DPR RI mendorong operator telekomunikasi di Indonesia untuk berpartisipasi dalam penyediaan layanan telekomunikasi di daerah terpencil, daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan di wilayah NKRI.
3. Komisi I DPR RI merencanakan akan membentuk Panja Pengelolaan dan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan selanjutnya pembentukan Panja tersebut akan dibahas dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI.
4. Komisi I DPR RI meminta operator Telekomunikasi untuk menyerahkan data mengenai cakupan layanan telekomunikasi di tingkat kabupaten dan kecamatan di Indonesia baik teknologi 2G maupun 3G per 31 Desember 2013.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul ..... WIB

Jakarta, 29 Januari 2014  
**KETUA RAPAT,**

**DRS. RAMADHAN POHAN, MIS.**  
**A-520**